



KPU Antisipasi Komplain Data Pemilih

JOGJA- KPU Kota Jogja sepertinya benar-benar *all out* untuk memaksimalkan tingkat partisipasi masyarakat pada pemilu presiden (pilpres) 8 Juli mendatang. Kewajiban bagi masing-masing Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk melakukan sosialisasi secara maksimal juga terus dilakukan.

Selain untuk meningkatkan jumlah partisipasi pemilih, langkah ini dilakukan juga dalam rangka menghindari sekecil mungkin munculnya protes dan komplain dari masyarakat setelah pelaksanaan pilpres.

"Bisa saja mereka akan protes karena merasa tidak terdaftar. Nah dengan memaksimalkan pendataan dan sosialisasi ini diharapkan komplain bisa diminimalisasi," kata anggota KPU Kota Jogja Sunaji, kemarin (6/5).

Menurut dia, guna memaksimalkan peran PPDP dan PPS

ini, hingga 8 Mei mendatang, KPU Kota Jogja akan melakukan monitoring dan supervisi di 45 kelurahan yang ada di wilayah Kota Jogja. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan pekerjaan yang sudah dilakukan PPDP dan PPS dalam rangka melakukan pemutakhiran data pemilih.

"Ini juga untuk mengetahui hambatan dan keluhan yang dialami para petugas di lapangan, sehingga segera dapat dilakukan perbaikan," tambahnya.

Ini penting dilakukan, karena PPDP dan PPS akan bertugas mendatangi setiap Kepala Keluarga (KK) dengan meninggalkan tanda jejak berupa stiker yang ditempel di rumah-rumah yang sudah didata.

Baru, setelah dilakukan pendataan dan penempelan stiker itu, petugas akan mengisinya dalam formulir khusus yang sudah disediakan. Data dalam formulir ini dicantumkan nama-nama pemilih yang

sudah terdata. "Dengan cara seperti ini, kami berharap akan memiliki bank data yang lebih akurat," tegasnya.

Tahapan berikutnya, KPU Kota akan mengumumkan daftar pemilih sementara (DPS) mulai 11-17 Mei. Selama rentang waktu ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan. Bagi mereka yang belum terdaftar, atau warga yang seharusnya memang sudah tidak layak didaftar akan dimintakan tanggapan dari masyarakat.

Guna kepentingan ini, KPU Kota sudah berkoordinasi dengan Pemkot Jogja untuk melakukan kegiatan pengumpulan warga di tingkat RT. KPU Kota sudah mengajukan dana ke Pemkot Jogja untuk mendukung kegiatan ini. Sesuai amanat UU, pemerintah daerah setempat bisa memberikan dana fasilitasi kepada KPU. "Setelah tahap ini, selanjutnya akan ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap pilpres 8 Juli men-

an Kepada Yth. :
 Walikota Yogyakarta
 Wakil Walikota Yogyakarta
 Sekretaris Daerah
 Asisten

an Kepada Yth. :

Instansi

KPU
 Parwaslu



**PASTIRAN ANJAU MENDAFTAR SEBAGAI PEMILIH DALAM
 PILPRES 2009 SEBELUM 10 MEI 2009**
 JIKA BELUM MENDAPAT STIKER DARI PPDP/PPS/PPS TERDEKAT LAYAK DIDAFTAR
 DIN MITRAHUN/RADAR JOGJA

AJAKAN MENDAFTAR: Spanduk sosialisasi agar warga aktif mencatatkan diri sebagai calon pemilih pada pilpres mendatang dipasang oleh KPU Kota Jogja.

datang," lanjut Sunaji.
 Sosialisasi agar warga masyarakat aktif melakukan checking daftar pemilih ini terus dilakukan. Jika KPU Pusat aktif mengirimkan SMS kepada pengguna ponsel, spanduk imbauan juga banyak dipasang di lokasi-lokasi strategis. Isinya, bagi warga yang belum terdaftar diharapkan untuk mendatangi RT, RW terdekat. (din)

Positif Segera Untuk diketahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 19 Januari 2025
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005